

OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) DAN AKSELERASI PADA PROGRAM SERTIFIKASI EKOLEBEL PERUM PERHUTANI DI JAWA TIMUR

Murgianto¹, Soekarno Hs.², Sugiono³

¹Dosen Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
e-mail: murgiantoanto@yahoo.co.id

²Dosen FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
e-mail: sukarno_hs@yahoo.com

³Dosen Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
e-mail: sugiono@untag-sby.ac.id

Abstrak

Salah satu cara melaksanakan Pengelolaan Hutan Lestari adalah melalui proses sertifikasi secara internasional yang dikenal dengan Sertifikasi Ekolebel. Program sertifikasi akan dapat berjalan sangat baik apabila mendapat dukungan dari masyarakat sekitar hutan dan yang sudah tergabung dalam organisasi LMDH. Dukungan LMDH terhadap program sertifikasi akan mempercepat pelaksanaan program sertifikasi ekolebel di KPH Perum Perhutani di Jawa Timur. Metode penelitian yang dipakai adalah menggunakan random sample secara purposive terhadap 23 KPH di Jawa Timur dipilih 3 KPH analisis yang dipakai adalah uji mean berpasangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa LMDH Pemula, LMDH Sedang maupun LMDH unggulan di KPH sangat mendukung program sertifikasi yang sedang maupun yang akan dilakukan. Hal ini terbukti dari hasil uji beda mean berpasangan di KPH Madiun, Ngawi dan Bojonegoro terletak di daerah tolak maka H_0 diterima yang berarti tidak ada perbedaan diantara ketiga jenis LMDH dalam mendukung program sertifikasi.

Kata kunci: Optimalisasi LMDH

1. PENDAHULUAN

Issue lingkungan menjadi topik yang hangat pada dua abad terakhir ini mengingat masalah tersebut terkait erat dengan keberlangsungan hidup umat manusia. Konferensi *Earth Summit* yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada bulan Juni 1992 merupakan salah satu momen penting dalam sejarah 'lingkungan'. Tjokrowinoto (2007:16) mencatat bahwa signal-signal bumi yang merupakan umpan balik kegiatan manusia makin *manifest* (diwaspadai) dimana bumi makin memanas (*global warming*), terjadinya lubang ozon, hujan asam (*acid-rain*), degradasi tanah, deforestasi, desertifikasi, dan polusi. Apa yang dicatat oleh Tjokrowinoto tersebut menjadi agenda penting dalam *Earth Summit* 1992. Sedangkan *UN Climate Change Conference* tanggal 3-14 Desember 2007 di Bali (Indonesia) salah satunya membahas tentang peranan hutan sebagai pengendali perubahan iklim melalui penyerapan carbon.

Berdasarkan hasil Konferensi Para Pihak Ke-13 dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim di Bali 3-14 Desember 2007 terdapat program 'Perdagangan Karbon' yang melibatkan berbagai pihak antara lain masyarakat lokal, LSM, Swasta dan Lembaga Internasional. Presiden Bank Dunia Robert B. Zoellick pada tanggal 11 Desember 2007 di Bali telah meluncurkan *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF). Dana yang diluncurkan sejumlah 160 juta USD dari 300 juta USD yang direncanakan (di mana sejumlah 100 juta USD untuk program *redded mechanism* dan sejumlah 200 juta USD untuk program *carbon finance*

mechanism). Pembiayaan ditujukan kepada upaya jangka panjang berkesinambungan pada konservasi dan pengembangan masyarakat di hutan tropis. Dana tersebut juga disiapkan untuk mendanai mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi fungsi hutan (Data Pendukung Terlampir)

Berdasarkan luasan kepemilikan hutan, Indonesia termasuk pangsa pasar program pendanaan (*carbon finance mechanism*) tersebut, namun mengingat Indonesia bersama Brazil adalah penyumbang 70-80% emisi akibat deforestasi dan degradasi fungsi hutan maka terdapat kekhawatiran (Kompas, 12 Desember 2007:13). Untuk itu Indonesia masih harus menyiapkan manajemen dan sumber daya manusia (SDM) internal sedemikian rupa sehingga masyarakat desa hutan (Data Pendukung Terlampir) tidak menjadi 'korban ganda' (Korban akibat deforestasi dan korban terabaikan akibat program penjualan karbon tersebut). Salah satu usaha adalah penggalakan program pengelolaan hutan lestari.

Pengelolaan hutan secara lestari (ekonomi, lingkungan, dan sosial kemasyarakatan) dapat diwujudkan melalui optimalisasi keterlibatan para pihak agar pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kaidah kelestarian, diperlukan pengakuan dari pihak ketiga yang independen, kredibel dan dapat diterima oleh semua pihak secara global (internasional). Salah satu cara adalah melaksanakan Pengelolaan Hutan Lestari melalui proses sertifikasi secara internasional yang dikenal dengan Sertifikasi Ekolebel. Sejak tahun 1992 telah terjadi pergeseran nilai-nilai di masyarakat internasional, khususnya masyarakat Eropa terhadap produk-produk sumberdaya hutan yang beredar di pasar global. Khususnya para *green buyers* (kelompok yang peduli terhadap kerusakan hutan) menghendaki produk hutan yang dipergunakan berasal dari sumber yang dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip kelestarian. Diharapkan kelak *green buyers* menjadi penghapus pasar kayu ilegal.

Perum Perhutani sebagai BUMN (sejak tahun 1972 diserahkan untuk mengelola Sumberdaya Hutan (SDH) di Pulau Jawa dan Madura kecuali DKI Jakarta DIY Yogyakarta, dan hutan konservasi), berpartisipasi aktif mendorong diterapkannya Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) di Indonesia, khususnya di wilayah kerja Perum Perhutani. Sehubungan dengan itu telah terbit Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 090/KPTS/DIR/2006 tentang Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari di Perum Perhutani tanggal 22 Februari 2006. Sedangkan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur telah membuat Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Skema Forest Stewardship Council (FSC) yang berisikan Indikator Penilaian. Indikator tersebut terdiri atas 10 (sepuluh) prinsip sebagai Standard Pengelolaan Hutan Lestari skema FSC yang diterapkan di Perum Perhutani (termasuk Perum Perhutani Unit II Jawa Timur). Sepuluh prinsip tersebut merupakan penjabaran dari 3 (tiga) sasaran pokok (aspek) dari sertifikasi yaitu: produksi (ekonomi), lingkungan, dan sosial kemasyarakatan.

Terdapat 23 (dua puluh tiga) unit kerja manajemen yaitu Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) pada Perum Perhutani Unit II Jawa Timur yang dipersiapkan untuk mendapatkan sertifikasi PHL atau Ekolebel. Menjelang pertengahan tahun 2009, ada 2 (dua) KPH yaitu KPH Madiun dan KPH Banyuwangi Utara, yang telah menjalani proses akhir penilaian. Tahun 2009 ada 3 (tiga) KPH yaitu KPH Bojonegoro, KPH Jatirogo, dan KPH Saradan, melakukan persiapan untuk mendapatkan penilaian. Kemudian ada 2 (dua) KPH yaitu Ngawi dan Nganjuk yang dipersiapkan untuk mendapat penilaian pada tahun 2010. Berdasarkan perencanaan, sejumlah 23 KPH Perum Perhutani Unit II Jawa Timur harus tuntas mendapatkan sertifikasi PHL atau ekolebel pada tahun 2015.

Mengacu kepada data dan rencana tersebut, tampaknya perlu adanya strategi akselerasi dalam pencapaian target. Di samping itu, terdapat indikator (dari sepuluh indikator yang ada) atau kriteria, yang pemenuhannya memerlukan peran serta dari pihak di luar Perum Perhutani yaitu indikator 'Hubungan Dengan Masyarakat Sekitar'. Pemenuhan indikator yang terkait dengan masyarakat sekitar tersebut sebagai konsekuensi dari paradigma yang dianut oleh Perum Perhutani saat ini yaitu *Community Based Forest Management (CBFM)*, meninggalkan paradigma *State Based Forest Management*. Sebagai konsekuensinya adalah dalam mencapai sasaran internal corporate yaitu maksimalitas produksi, Perum Perhutani harus menyertakan keterlibatan masyarakat desa sekitar hutan. Sehingga sejak tahun 2001 telah digulirkan program

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah organisasi formal sebagai media kerjasama masyarakat dengan Perum Perhutani. Keberhasilan kinerja Perum Perhutani sebagian di antaranya dipengaruhi oleh kinerja LMDH tersebut, termasuk dalam pencapaian atau pemenuhan kriteria dalam sertifikasi ekolebel.

Perumusan Masalah

- Bagaimana peran LMDH dalam mendukung program sertifikasi yang dilakukan oleh Perum Perhutani Jawa Timur ?
- Apakah terjadi perbedaan perilaku LMDH dengan kriteria sertifikasi yang dilakukan oleh Perum Perhutani.

Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan Jangka Panjang: Membantu terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari pada wilayah hutan di Indonesia pada umumnya dan di wilayah Perum Perhutani Unit II Jawa Timur khususnya melalui percepatan program sertifikasi ekolebel.
- 2) Tujuan Jangka Menengah: Membantu pencapaian target pelaksanaan sertifikasi ekolebel di lingkungan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, yaitu seluruh unit manajemen (23 Kesatuan Pemangku Hutan/KPH) sudah selesai pada tahun 2015, sekaligus membantu upaya dalam mempertahankan sertifikasi yang diperoleh.
- 3) Tujuan Jangka Pendek: (1). Memfasilitasi hubungan KPH di lingkungan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur dengan Masyarakat Desa Hutan (Lembaga Masyarakat Desa Hutan/LMDH) dalam pelaksanaan sertifikasi ekolebel. (2). Membantu menciptakan program komputasi untuk akurasi, akselerasi dan optimalisasi pelaksanaan ekolebel di setiap KPH Perum Perhutani Unit II Jawa Timur. (3). Membantu menemukan strategi atau pola dalam mempertahankan sertifikasi yang telah diraih, khususnya yang terkait dengan keperanan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

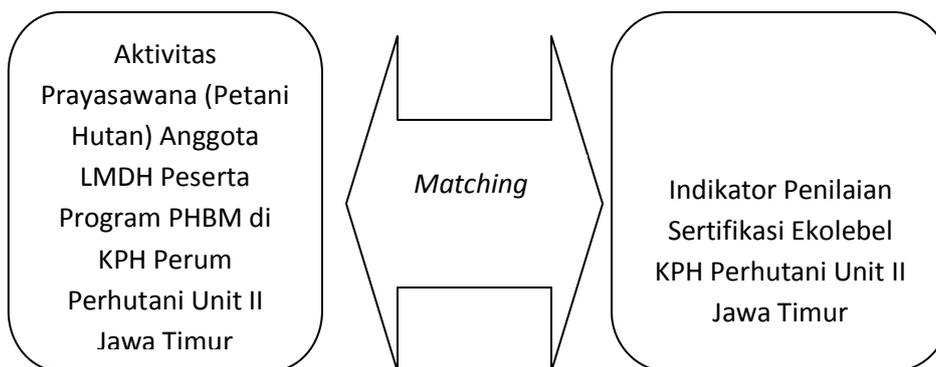
2. METODE DAN RANCANGAN PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian survey. Menurut Sugiyono (2007, 6) metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi dalam hal ini peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data yaitu dengan cara mengedarkan kuesioner, wawancara terstruktur, dan sebagainya. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan penahapan sbb:

Tahun Pertama, berkonsentrasi kepada 'Optimalisasi Peran LMDH dalam Program Sertifikasi Ekolebel' Pada tahap ini penelitian diarahkan kepada matching antara prinsip-prinsip yang terkandung dalam program sertifikasi ekolebel yang telah diterjemahkan dalam bentuk indikator penilaian pada petunjuk pelaksanaan, dengan aktivitas yang senyatanya dilakukan oleh para prayasawana (petani hutan) sebagai anggota LMDH dalam mengikuti program PHBM. Program PHBM adalah sarana kesertaan masyarakat desa hutan dalam pengelolaan hutan antara Perum Perhutani bersama dengan masyarakat. (Gambar 1.1)

Matching ini perlu dilakukan agar ditemukan letak disinkronisasi antara kecenderungan perilaku petani hutan dengan sasaran program sertifikasi ekolebel sekaligus sebagai upaya pencapaian tujuan akhir dari Pengelolaan Hutan Lestari. Sukarno, 2009 menemukan bahwa sikap dan perilaku sebagian petani hutan peserta program PHBM di Kabupaten Ngawi cenderung berorientasi jangka pendek yang dinilai kurang memperhatikan kelestarian tanaman hutan. Di samping itu terdapat tingkat kemajuan LMDH yang tidak setara, yang dapat diduga akan berpengaruh kepada pencapaian hasil sertifikasi ekolebel.



Gambar 2.1.
Matching antara Indikator Penilaian Sertifikasi Ekolebel dengan Aktivitas Prayasawana Program PHBM

Gap yang ditemukan dalam proses *matching* tersebut digunakan sebagai bahan dalam melakukan proses Optimalisasi Peran LMDH dalam program Sertifikasi Ekolebel. Proses ini dilakukan dengan cara: a). *Advisori*, yaitu pemberian masukan berupa konsep yang aplikatif kepada institusi terkait (Perum Perhutani, Masyarakat Desa Hutan, Pemerintah Daerah, Stakeholders lainnya); b). *Partnership*, yaitu menggalang kemitraan dengan institusi terkait untuk memberikan supporting; c). *Direct Supporting*, yaitu bantuan langsung yang dapat dirasakan oleh pihak terkait untuk mengurangi/menghilangkan gap yang ada.

Tahun Kedua. Jika penelitian sekaligus penerapan hasil penelitian pada tahun pertama telah dicapai, maka untuk tahun kedua Tim peneliti akan menciptakan Program Komputasi Sertifikasi Ekolebel Perum Perhutani Unit II Jawa Timur dengan menerapkan atau adopsi sebagian dari “The Audit Management System: Control, Analyse and Manage Your Management System Auditing Versi 2.3” (copyright 2002-3 Qulaity Clinics Ltd.), terutama dalam hal: Managing the Audits; Reporting; and Change to Real data.

Program Komputasi Sertifikasi Ekolebel ini disesuaikan dengan Standar Forest Stewardship Council (FSC) dengan prinsip-prinsip meliputi: a). Ketaatan Pada Hukum dan Prinsip-prinsip FSC; b). Hak Tenure dan Hak Guna Serta Tanggungjawab; c). Hak Masyarakat Adat; d). Hubungan masyarakat Adat dan Hak-hak Pekerja; e). Manfaat Hutan; f). Dampak Pada Lingkungan Hidup; g). Rencana Pengelolaan; h). Monitoring dan Evaluasi; i). Pemeliharaan Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCVF); dan j). Hutan Tanaman.

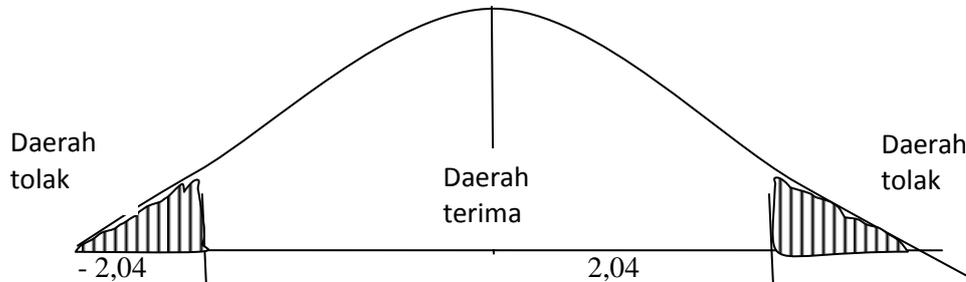
Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Perum Perhutani Unit II Jawa Timur sebagai Unit Manajemen yang mendapatkan sertifikasi ekolebel yaitu berjumlah 23 (dua puluh tiga) unit. Sedangkan Unit Manajemen yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah: a). KPH yang telah selesai melakukan penilaian sejumlah 2 unit; b). KPH yang sedang melakukan persiapan sebanyak 2 (dua) unit; dan c). KPH yang masih menunggu persiapan dalam mendapat penilaian Sertifikasi Ekolebel.

3. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Hasil Perhitungan KPH Madiun

Hasil perhitungan tanggapan LMDH terhadap program sertifikasi di daerah penelitian KPH Madiun dibandingkan dengan kriteria ekolabel ideal.



$$\alpha = 0,05$$

$$\text{Nilai } t \text{ (tabel)} = 2,04$$

$$H_0 \text{ diterima apabila : } -2,04 \leq t \leq 2,04$$

$$H_1 \text{ diterima apabila : } t > 2,04 \text{ atau } t < -2,04$$

$$\bar{D} = \frac{\sum D}{n} = \frac{-218}{30} = -7,2667$$

$$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D - \bar{D})^2}{n - 1}} = \sqrt{\frac{137,8667}{29}} = \sqrt{4,7540}$$

$$S_D = 2,1804$$

$$\text{maka : } t = \frac{-7,2667}{2,1804 \sqrt{29}} = -18$$

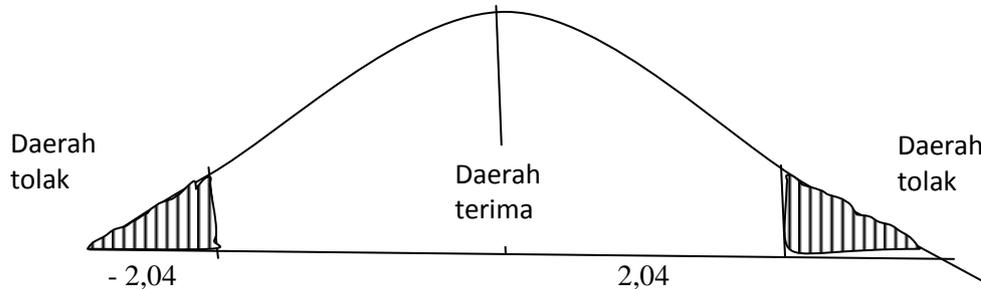
Kesimpulan :

Oleh karena $t = -18$ terletak didaerah tolak maka h_0 diterima yang berarti tidak ada perbedaan persepsi LMDH di daerah penelitian dengan kriteria ideal sertifikasi ekolabel Pada LMDH KPH Madiun. Artinya LMDH unggul yang ada di KPH Madiun sangat mendukung progam sertifikasi ekolabel yang telah dicanangkan Perum Perhutani Jawa Timur , hal ini terlihat dari telah lolosnya Kph Madiun dalam mendapatkan progam sertifikasi ekolabel dari KFC. Proses untuk mendapatkan sertifikasi tersebut relatif cukup lama yaitu mulai dari proses persiapan sampai pelaksanaan memerlukan waktu lima tahun.

Unsur yang paling mendukung dari 10 progam sertifikasi adalah unsur yaitu yang menyangkut hak-hak masyarakat adat, hak-hak pekerja dan pelaksanaan yang baik terhadap partisipasi LMDH dalam menjaga kerusakan hutan. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan bawa LMDH UNGGUL tidak ada perbedaan persepsi dengan kriteria ekolabel yang berarti hipotesa diterima.

Hasil Perhitungan KPH Bojonegoro

Hasil perhitungan tanggapan LMDH terhadap program sertifikasi didaerah penelitian KPH Bojonegoro dibandingkan dengan kriteria ekolabel ideal.



$$\alpha = 0,05$$

$$\text{Nilai } t \text{ (tabel)} = 2,04$$

$$H_0 \text{ diterima apabila : } -2,04 \leq t \leq 2,04$$

$$H_1 \text{ diterima apabila : } t > 2,04 \text{ atau } t < -2,04$$

$$\bar{D} = \frac{\sum D}{n} = \frac{-447}{29} = -15,4128$$

$$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D - \bar{D})^2}{n - 1}} = \sqrt{\frac{15284,26}{28}} = \sqrt{545,8793}$$

$$S_D = 23,3641$$

$$\text{maka : } t = \frac{-15,4128}{23,3641 \sqrt{2}} = -3,6$$

Kesimpulan :

Oleh karena $t = -3,6$ terletak didaerah tolak maka H_0 diterima yang berarti tidak ada perbedaan persepsi LMDH di daerah penelitian dengan kriteria ideal sertifikasi ekolabel. Pada LMDH KPH Bojonegoro.

karena $t = -12$ terletak didaerah tolak maka H_0 diterima yang berarti tidak ada perbedaan Oleh persepsi LMDH di daerah penelitian dengan kriteria ideal sertifikasi ekolabel. Pada LMDH KPH Bojonegoro. Artinya Lembaga masyarakat desa hutan di KPH Bojonegoro walaupun masih belum dipersiapkan untuk pelaksanaan program sertifikasi mempunyai dukungan terhadap program sertifikasi ekolabel. Hal ini berbeda dengan hipotesis yang diajukan bahwa terjadi perbedaan dukungan antara LMDH UNGGUL, SEDANG dan PEMULA terhadap program sertifikasi. Terjadinya perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah Peserta LMDH adalah sudah lama melakukan kerjasama dengan perhutani dalam pelaksanaan program PHBM, Peserta LMDH sudah menyetujui program yang dituangkan dalam surat perjanjian, peserta LMDH telah sepakat untuk mensukseskan kelestarian hutan. Peserta LMDH sudah sering mengikuti sosialisasi bahwa tujuan akhir dari pelaksanaan PHBM dan

dibentuknya organisasi LMDH adalah untuk mewujudkan hutan yang lestari baik untuk kepentingan ekonomi, konservasi lingkungan.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas menunjukkan bahwa LMDH Unggul yang telah disertifikasi di KPH Madiun, KPH sedang persiapan sertifikasi, dan LMDH yang masih menunggu sertifikasi tidak ada perbedaan dukungan terhadap program sertifikasi. Artinya baik LMDH di KPH Madiun, KPH Bojonegoro sangat mendukung semua program sertifikasi khususnya indikator sosial yang menjadi sasaran dalam penelitian ini.

4. SIMPULAN

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara LMDH UNGGUL, SEDANG dan PEMULA terhadap criteria sertifikasi ecolabel. Artinya ketiga jenis LMDH sangat mendukung terhadap program sertifikasi ecolabel yang dicanangkan oleh KPH II Jawa Timur. Hal ini terlihat dari uji statistic di ketiga Lembaga Masyarakat Desa Hutan di KPH Madiun, Ngawi dan Bojonegoro. Bahwa hasil uji t terletak didaerah tolak maka hipotesa yang diajukan ditolak dan hipotesa 0 diterima.

Tidak adanya perbedaan di ketiga jenis LMDH tersebut dikarenakan telah sering mendapatkan penyuluhan-penyuluhan lewat perhutani melalui program PHBM, pengelolaan hutan lestari, dan sertifikasi ecolabel.

Saran

Penguatan Lembaga masyarakat Desa hutan sangat diperlukan melalui pendampingan, pelatihan, dalam rangka memberi pemahaman yang baik tentang maksud dan tujuan sertifikasi ecolabel.

Diperlukan pendampingan secara terus menerus untuk memberi pemahaman kepada LMDH tentang arti dan pentingnya sertifikasi ecolabel terhadap kelestarian hutan. Penguatan usaha ekonomi tanaman produktif pada LMDH, melalui pelatihan manajemen, Pengenalan tanaman produktif yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ade Fadli.n.a. *Pengelolaan Hutan Berbasis Bioregion*. <http://www.walhi.or.id/kampanye>
- Ade Fadli. *Sistem Hutan Kerakyatan*. <http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/shk/>
- Adimihardja, Kusnaka. *Budaya Tradisional dan Lokal di Tengah Multikultural dan Arus Globalisasi*. www.forum-rektor.org/file/artikel/def_artikel.jpg, Forum Rektor, 1995
- Aliadi, Arief. *Exploring Regional Community-Based Natural Resource Management (CBNRM) Policy Advocacy Workshop*. 6-10 Februari 2006, Silang Cavite, Philipine, didukung oleh IIRR dan IDRC Arif Aliadi/LATIN. www.latin.org.id
- Aliadi, Arief. *Pengetahuan Lokal untuk Konversi Sumberdaya Hutan*. Seminar Nasional Pengembangan Teknologi dan Budaya Lokal Sebagai Basis Pembangunan Berkelanjutan. Dies Natalis IPB ke-39, 24 September 2002. (lia@latin.or.id),
- Arimbi HP. *Penghancuran Secara Sistematis Sistem-sistem Adat Oleh Kelompok Dominant*. Jakarta: WALHI dan Friens of the Earth (FoE), 1997
- Aruan, Nakkok. 2003. *Implementasi Desentralisasi Kehutanan. Studi Eksplorasi di Jawa Timur*. Surabaya: Balitbang Prof Jatim
- Asrani. *Ekonomi Politik Sumberdaya Alam Indonesia Pada Era Orde baru. Studi Tentang Kelangkaan Struktural dan Konflik di Propinsi Kalimantan Tengah*. Disertasi. Surabaya: PPS-Untag, 2004
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2002. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2002*. Jakarta: BPS

- Benefits for people and society: a Systems approach.* (21 Maret 2005) www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/D_OCREP/005/Y7581E/y7581e10.htm
- Bertucci, Guido and Andriana Alberti, *The United Nations Program in Public Administration: Reinventing Itself to Help Reinvent Public Administration*, 2005
- Buckles, D and Rosnak G. 1999. *Cultivating Peace: Conflict and Collaboration in Natural Resource Management*. USA: World Bank Institute.
- Buck, Louis, Lini Wollenberg dan David Edmunds, *Adaptif-Co Management*, 2000.
- BUMN Online Development. 2002. *Community Based Forest Management. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat*. (1 April 2001)
- BUMN Online Development. 2002. *Community Based Forest Management. Good Corporate Governance PT Perhutani*. (16 April 2002)
- BUMN Online Development. 2002. *Community Based Forest Management. Up Grade Sistem Manajemen Mutu PT Perhutani*. (1 Januari 2000)
- Chambers, Robert. 1997. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES
- Center for Economic and Social Studies, dan Overseas Development Institute. *Program Sertifikasi*. (<http://us.oneworld.net>)
- Closkey, David Mc. *Ecology and Community: The Bioregional Vision*. <http://www.columbian.org/bioregions.htm> (21 Maret 2005)
- COMMUNITY BASED FOREST MANAGEMENT April 16, 2005 www.perhutani.com.
- Contreras-Hermosilla dan Chip Fay (Dengan Kontribusi Elfan Effendi, Juni Thamrin, Sulaiman Sembiring, Mertua Sirait). *Memperkokoh pengelolaan hutan Indonesia melalui pembaruan penguasaan tanah: Permasalahan dan kerangka tindakan*. Bogor: IPB, www.worldagroforestrycentre.org/sea. © 2006 World Agroforestry Centre
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Second Edition. California: Sage Publications, 2003
- Criteria and Indicators for Conservation of Biological Diversity. www.fao.org/DOCREP/005/Y7581E/Y7581e10.htm#PO_35
- Cook, Sarah and Steve Macaulay, *Perfect empowerment*, 1996
- Deklarasi Yogyakarta Serukan Hutan Lestari Berbasis Masyarakat, 22/09/2006 www.infojawa.org/index.php
- Departemen Kehutanan. *Promosi Hasil-hasil Pembelajaran Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Dephut, 2006. [Perhutanan Sosial@dephut.go.id](http://www.dephut.go.id/content.php?id=243). www.dephut.go.id/content.php?id=243. © Copyright Departemen Kehutanan 2005
- Dewanta, A.S. 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media
- Didik Suharjito. *Hutan Rakyat: Kreasi Budaya Bangsa*. (www.kpshk.org/index.php?option=com_content&task)
- Djuhendi Tadjudin. *Hutan Kemasyarakatan. Mimpi Polisi Hutan vs Kebutuhan Masyarakat*. http://www.latin.or.id/index.ctm?fuseaction=hkm_dt
- Dunn, Edgar S. *Economic and Social Development: A Process of Social Learning (1971)*.
- Dwiyanto, Agus *"Kemitraan pemerintah-swasta dan relevansinya*, 1996
- Fitri Nurfitriani dan Doddy S. Sukadri. *Pengelolaan Hutan di Masa Depan: Berdasarkan Paradigma Kehutanan Di Abad 21 (Forest Management in the Future : Based on Forestry Development Paradigm in the 21 th Century)*. Buletin Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Vol.2, No. 2, Th. 2001
- Friedmann, John. 1992. *Empowerment the Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell

Optimalisasi Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Akselerasi Pada Program Sertifikasi Ekolabel Perum Perhutani di Jawa Timur

- Geertz, C.1963 *Agricultural Involution*. Calofornia: Universitas of Calofornia Press General News. Monday April 14, 2003. *Perhutani Tutup Sejumlah Penambangan Emas*.
- Haningan, JA. 1995. *Environmental Sociology: A Social Constructionist Perspective*. New York:
- Hubeis, Aida Vitayala. *Pemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan*. Peoples International Centre for Policy Research and Education, E-mail: tebtebba@skynet.net; <http://www.tebtebba.org2> , 2004
- Hyden, Goran. *Operationalizing Governance for Sustainable Development*, 2001
- Interface between Biological Diversity and Sustainable Forest Management. www.fao.org/DOCREP/005/Y7581E/Y7581e10.htm#PO_34
- Jamasy, O. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Belantika.
- John MacDougall. 2000. *Hutan Kemasyarakatan*. apakabar@igc.org
Kapanlagi@com. *Hindari Opportunity Loss, Perhutani Tambah Tebangan*.
- Kehutanan Propinsi Jawa Tengah. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan*
www.dephut.go.id/INFORMASI/PROPINSI/JATENG/JATENG.HTML
- Khan, M. Adil. 1996. *Economic Development, Poverty Alleviation and Governance. The Asian Experience*. USA: Avebury.
- Kompas, 3 April 2001. *Belum Satu Pun Komitment Bidang Kehutanan Terlaksana*.
- Kompas, 6 April 2001. *Buruk, Pengelolaan Hutan Jati di Pulau Jawa*.
- Kompas, 5 Maret 2005. *Masa Depan Hutan Indonesia*.
- Kompas, 31 Maret 2005. *10.000 Pekerja Sektor Industri Kehutanan Terancam PHK*
- Kompas, 5 Agustus 2005. *Potensi Konflik Pemanfaatan Hutan*
- Kompas, 13 Januari 2007. *Hutan Hancur: Rakyat Makin Sengsara*.
- Korten, David C. 1998. *Pembangunan Berdemensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Laver, Robert H. 1989. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Bina Baskara
- Laver, Robert H 1977. *Perspectives on Social Change*. Boston: Allyn and Bacon (Question Media America, Inc . www.questia.com)
- Lembaga Ekolabel Indonesia. *Telah diluncurkan : Aliansi Pendukung Sertifikasi PHBML* 29 November 2006. Copyright © 2003 by Lembaga Ekolabel Indonesia. www.linknolimit.com
- Leonard .*Perjalanan Panjang Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Indonesia*. Pemantauan, 05 Juni 07 www.fwi.or.id/?buka=viewuser&user=leonard
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Jawa: Sebuah Analisis Falsafi Tentang Kebijakan Hidup Jawa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Malla, Yam B., Hari R. Neupane, Peter J. Branney. Why aren't Poor People Benefiting More from Community Forestry? *Journal of Forest and Livelihood* 3(1) July, 2003 Malla, Y. B. et al
- Malaysia. Jabatan Perhutanan Sabah. *Perhutanan Masyarakat di Kg. Minusoh, Torgod*.
- Melberg, Hans O. 1993. *Three Arguments About Rational Choice. Theory in Sociology*.<http://www.geocities.com/hmelberg/paper/930520.htm>
- Muayat. *Kajian terhadap Kemandegan HKm dan Draft Permen Pemberdayaan Masyarakat*. 2005, < muayat@indo.net.id >
- Nababan, Abdon 2003. *Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Adat. Tantangan dan Peluang* (<http://www.psdma.dipph.ipb.ac.id>)
- Njurumana, Gerson ND. *Nilai Penting Kearifan Lokal Dalam Rehabilitasi Lahan*. Denpasar: Balai Litbang Kehutanan Bali dan Nusa Tenggara, n.a.

- Oliver and Larson. *Some Key Concepts In Biological Diversity Conservation In Relation To Forests*. www.fao.org/DOCREP/005/Y7581E/Y7581e10.htm#PO_32
- Osborne, Plastik., *Banishing Bureaucracy: The Five strategies for Reinventing Government*., 1997
- Osborn, David dan Peter Plastik. *Memangkas Birokrasi : Lima Strategi Menuju Pemerintahan*, 2000
- Osborne, David and Ted Gaebler, *Reinventing government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, 1992
- Panduan Pengembangan Peran Masyarakat Kampung Dalam Pengelolaan Hutan*. Samarinda: Community Social Forest-Unmul dan Pemkab. Kutai Barat. (<http://www.iges.or.id/en/fc/pdf/report10.pdf>.)
- PERHUTANI. 2005. *Sertifikat Ecolabeling*. www.perhutani.co.id/sertifikasi.html
- Pikiran Rakyat, 26 April 2004. *Perhutani Terkesan Ragu Tindak Penebangan Ilegal*. Pikiranrakyat@com
- Pusat Komunikasi Lingkungan. *Hutan Kemasyarakatan*. www.Pili.or.id/main.htm.
- Revitalisasi Industri Kehutanan, Sosial Forestri*, Lembaga Penilai Independen, Illegal Logging [1] (www.latin.org.id)
- Raharjo. 1995. *Memberdayakan Rakyat dalam Pembangunan Indonesia*. Yogyakarta: P3PK-UGM
- Riyanto, Budi. *Pengaturan Hutan Adat di Indonesia: Sebuah Tinjauan Terhadap Undang-undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Penyunting Suwanto. Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2004
- Riyanto, Budi. *Selayang Pandang Pengelolaan Kawasan Hutan Di Indonesia*. Penyunting Suwanto. Bogor: LPHKL, 2004
- Rochman, Meuthia Gani "Good Governance", 1999
- Rupelu, D. 2001. *Analisis Kelangsungan Usaha dan Pengaruhnya terhadap Penguasaan Kemiskinan Nelayan di Kabupaten Buru Propinsi Maluku*. Disertasi. Surabaya: Unair
- Sabarudi, Maman Mansyur Idris, Budiman Achmad dan M. N. Iman. *Community forestry for poverty reduction-lessons learned in Indonesia*. www.fao.org/007/ad511e/ad511e0e.htm
- Salim, Emil. 1984. *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan pendapatan*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- San Arif Awang. *Model Formasi Sosial dan Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Indonesia*. <http://www.damar.or.id/artikel/modelformasisosial/index.php>.
- Sandhills Area Land Trust, 2001-2007 Resourceful Communities Program. www.phase2technology.com
- Santoso, Hary. 2000. *Menciptakan Basis Moral dan Material Masyarakat Desa Hutan*. <http://www.damar.or.id/artikel/artikel.php>
- Simon, H. 1999 *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat. Teori dan Aplikasi pada Hutan Jati Di Jawa*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika
- Some Key Concepts in Biological Diversity Conservation In Relation To Forest www.fao.org/DOCREP/005/Y7581E/Y7581e10.htm#PO_32
- Springate-Baginski, Oliver., Om Prakash Dev, Nagendra Prasad Yadav, John Soussan *Community Forest Management in the Middle Hills of Nepal: The Changing Context*. *Journal of Forest and Livelihood* 3(1) July, 2003 Springate-Baginski, O. et al.
- Springate-Baginski, Oliver., Om Prakash Dev, Nagendra Prasad Yadav, John Soussan. *Weaknesses and Constraints of the Community Forestry Process in Nepal* *Journal of Forest and Livelihood* 3(1) July, 2003 Springate-Baginski, O. et al.
- Suara Pembaharuan, 9 November 1996. *Perambah Hutan Di Indonesia*
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2007

Optimalisasi Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Akselerasi Pada Program Sertifikasi Ekolabel Perum Perhutani di Jawa Timur

- Surabaya Post, 6 April 2001. *Gerakan Kembali Ke Hutan Ala Taman Nasional Meru-Betiri: Sulap Masyarakat Hutan Jadi Pak Tani Berbudaya Hutan.*
- Tjokrowinoto, Moeljarto. *"Bureaucracy and social change: repositioning the bureaucracy*, 1998
- Tjokrowinoto, Moeljarto. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Todaro, Michael P. 1997. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Toynbee, Arnold J n.n. *Challenge and Response*
- Wahyu F. Riva.2005 *Sebuah Tinjauan Hutan Indonesia*. [www.wahyuriva @yahoo.com](http://www.wahyuriva@yahoo.com).
- Wahyu F. Riva. *Riniasi Sertifikat PHBML: Sebuah Pengakuan Kelola Hutan Berbasis Masyarakat ?* 20 Agustus 2004 Copyright (c) 2003 by Lembaga Ekolabel Indonesia.
- WALHI 2003. *Mengecat Rumah Keropos: Krisis Hutan Jawa dan Inefisiensi Perum Perhutani* (<http://www.walhi.com>)
- Widana, I. Nyoman. *Pengelolaan Hutan Terpadu. Studi Tentang Partisipasi Stake Holders Dalam Pengendalian Penebangan Liar di Jawa Timur*. Disertasi. Surabaya: PPS-Untag, 2007.